

PERBEDAAN PREFERENSI KOMITMEN NEGARA-NEGARA ASEAN TERHADAP ARMS TRADE TREATY

Author: Reza Vahlevi

Email: rezavahlevi5@gmail.com

Supervisor: Dr. Mhd. Saeri, M. Hum.

Bibliografi: 13 Buku, 29 Jurnal, 12 Laporan Penelitian, 59 Dokumen Resmi, 13 situs web.

Jurusan Hubungan Internasional—Konsentrasi Strategi dan Keamanan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas, Pekanbaru, Riau 28293

Abstract

A country will determine the choice of international commitments to other actors and to international treaties that become its concentration base on certain strategies that are closest to its preferences. Through commitment preferences, this study seeks to explain the causes of the different levels of commitment of ASEAN countries to the Arms Trade Treaty—the negotiation process and signing—which hinders the universalization and implementation of the Arms Trade Treaty as arms transfer control among ASEAN countries so that it needs special attention.

The author uses a neorealism perspective with the assumption that in the anarchic structure of the international system, a country's preference for international commitment to certain international treaties is based on the seek for security. This assumption allows the author to use modifiers for military strategy theory to determine indicators in the independent variables. The author also uses qualitative methods with logistic regression statistical instrument/tool to identify the most influential predictors and variations in the dependent variable.

This study concludes that the indicator of the type of government regime is the only statistically significant indicator that most influences the differences in the commitments of ASEAN countries to the Arms Trade Treaty where the more democratic a country is, the higher the probability of signing the text of the Arms Trade Treaty.

Keywords: *International Commitments, International Treaties, Commitment Preferences, Arms Trade Treaty.*

Pendahuluan

Majelis Umum PBB pada 2 April 2013 telah menyetujui draf resolusi Traktat Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty*), sebuah traktat yang mengamanatkan serangkaian standar global untuk perdagangan internasional atas delapan jenis senjata konvensional dengan perhitungan suara: 156 setuju, 3 menolak, dan 22 abstain.¹ Langkah tersebut merupakan upaya nyata dalam mengatur dan meningkatkan regulasi transfer senjata internasional; dan mencegah dan memberantas perdagangan ilegal dan penyimpangan/pengalihfungsian oleh pengguna atau penggunaan yang tidak sah.

Inti dari *Arms Trade Treaty* adalah persyaratan yang diberlakukan terhadap negara-negara anggota untuk membangun sistem kontrol nasional untuk ekspor, impor, transit, pengapalan, dan perantaraan, terhadap delapan jenis senjata konvensional (tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri berkaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, misil dan peluncur misil, dan senjata kecil dan senjata ringan); tercatat dalam laporan transfer senjata nasional. Sistem ini harus mencegah transfer senjata yang akan digunakan dalam komisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus

menilai apakah ekspor dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional.

Sejak berlakunya *Arms Trade Treaty* pada 24 Desember 2014, hingga saat ini sudah 110 negara yang menjadi negara anggota dan 31 negara yang menjadi negara penandatangan, di mana dari sepuluh negara ASEAN, hanya Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang menjadi *Signatory State*; sementara Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Myanmar, dan Vietnam, masih belum bergabung ke dalam *Arms Trade Treaty*.² Perkembangan demikian menghambat universalisasi dan implementasi *Arms Trade Treaty* sebagai kontrol transfer senjata di negara-negara ASEAN sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai bagian dari Asia yang tercatat sebanyak 27 negara dengan jumlah negara terbanyak yang belum bergabung ke dalam *Arms Trade Treaty*.

Yonatan Lupu mengatakan pentingnya memahami preferensi suatu negara dalam menjelaskan posisinya di dalam komitmen internasional. Lupu menunjukkan bahwa keputusan suatu negara untuk

¹ Arms Trade Treaty, *Treaty Status: Adoption and Entry into Force*, diakses dari <https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883>, pada tanggal 22 Desember 2019.

² Arms Trade Treaty, *Treaty Status: Adoption and Entry into Force*, diakses dari <https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883>, pada tanggal 2 Agustus 2020.

komit terhadap traktat internasional tertentu, memungkinkan negara tersebut untuk menghindari keuntungan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang, sehingga menghindari perilaku negara dari tindakan tanpa keawajiban apapun.³ Seorang aktor akan menentukan pilihan komitmen internasional terhadap aktor lainnya dan menggunakan strategi tertentu dalam mencapai pilihan komitmen yang paling mendekati preferensinya, Jeffry Frieden menyebutnya *preferences over outcomes*.⁴

Perumusan strategi militer berperan penting dalam menghubungkan antara kondisi lingkungan politik dan keamanan dengan pilihan komitmen terhadap *Arms Trade Treaty*. Melalui perumusan strategi militer, pilihan komitmen internasional terhadap *Arms Trade Treaty* ditentukan oleh seberapa besar persepsi ancaman negara-negara ASEAN terhadap absen atau tidaknya regulasi transfer senjata konvensional dan bagaimana kebijakan pertahanan menentukan komit atau tidaknya terhadap traktat internasional tersebut. Penggunaan indikator arketipe pertahanan sebagai

variabel sistemis menunjukkan perilaku *balancing* berdasarkan persepsi ancaman. Sementara indikator budaya institusi militer, inovasi teknologi militer, kapabilitas tempur militer, tipe rezim pemerintahan, dan ekonomi menunjukkan peran variabel domestik yang menentukan apakah komitmen internasional tersebut mendukung/memungkinkan untuk menerima kewajiban internasional yang ditawarkan oleh *Arms Trade Treaty*.

Penggunaan kondisi lingkungan politik dan keamanan dalam perumusan strategi militer sebagai indikator dari variabel independen yang dikuantifikasi dengan teknik statistik regresi logistik, memungkinkan penulis melakukan generalisasi terhadap preferensi komitmen negara-negara ASEAN berdasarkan prediktor mana yang paling berpengaruh.

Proses Perumusan Arms Trade Treaty (ATT Making Process)

Proses perumusan *Arms Trade Treaty* diawali dengan pengesahan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/89 pada Sidang Pleno PBB ke-67, Sidang Umum PBB sesi ke-61, 6 Desember 2006, dengan perhitungan suara: 153 setuju, 1 menolak, 24 abstain, dan 14 tidak memberikan suara, yang dipelopori oleh kampanye dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat beserta kelompok Penerima Hadiah Nobel Perdamaian dan tujuh negara yang terdiri dari Argentina,

³ Yonatan Lupu, "The Informative Power of Treaty Commitment: Using the Spatial Model to Address Selection Effects," *Jurnal American Journal of Political Science*, 57 (4), (Oktober 2013), hal. 912—913.

⁴ David Lake dan Robert Powell, *Strategic Choice and International Relations*, (New Jersey: Princeton University Press, 1999), hal. 42—45.

Australia, Britania Raya, Finlandia, Jepang, Kenya, dan Kosta Rika; mengakui absennya standar internasional bersama terhadap impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional, merupakan faktor yang menyebabkan konflik, perpindahan manusia, kejahatan, terorisme, dan merusak perdamaian, rekonsiliasi, keamanan, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal PBB pada Sidang Umum PBB sesi ke-62 telah menyerahkan laporan A/62/278 Bagian I dan II berupa kompilasi pandangan dari 92 negara yang memuat pandangan umum dan kaitannya dengan kelayakan, ruang lingkup, dan parameter konsep tentang standar internasional terhadap impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional. Kemudian pada September 2007, Sekretaris Jenderal PBB telah membentuk kelompok *Governmental Experts* yang terdiri dari 28 negara dengan tugas memeriksa kelayakan, ruang lingkup, dan parameter konsep atas instrumen yang komprehensif dan mengikat secara hukum terhadap standar internasional untuk impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional atas kompilasi pandangan dari 92 negara di dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tersebut.

Kelompok *Governmental Experts* yang telah mengadakan tiga kali pertemuan pada 11 Februari—8 Agustus 2008, juga telah menyerahkan laporan A/63/334 pada

Sidang Umum PBB sesi ke-63 yang memuat ikhtisar atas 92 pandangan dari negara-negara anggota atas kelayakan, ruang lingkup, dan parameter konsep tentang standar internasional terhadap impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional. Kemudian Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/63/240 pada 24 Desember 2008 dengan perhitungan suara: 133 setuju, 1 menolak, 19 abstain, dan 39 tidak memberikan suara.

Kelompok *Open-Ended Working* yang telah mengadakan tiga kali pertemuan pada 23 Januari—17 Juli 2009, juga telah menyerahkan laporan A/AC.277/2009/1 pada Sidang Umum PBB sesi ke-64 yang memuat diskusi yang konstruktif, mendalam, dan ekstensif, tentang unsur-unsur di dalam tujuan, sasaran, ruang lingkup, parameter, dan aspek lainnya dalam mencapai konsensus terhadap kemungkinan penyusunan draf *Arms Trade Treaty*. Kemudian Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/64/48 pada 2 Desember 2009 dengan perhitungan suara: 151 setuju, 1 menolak, 20 abstain, dan 20 tidak memberikan suara.

Sekretaris Jenderal PBB pada Sidang Umum PBB sesi ke-66 telah menyerahkan laporan A/66/166 berupa kompilasi pandangan dari 13 negara yang memuat unsur-unsur traktat dan masalah-masalah relevan lainnya terkait Konferensi PBB tentang *Arms Trade Treaty*.

Komite Persiapan untuk Konferensi PBB tentang *Arms Trade Treaty* yang telah mengadakan empat kali pertemuan pada 12 Juli 2010—17 Februari 2012 telah menyerahkan laporan A/CONF.217/1 yang memuat simpulan keputusan substantif Komite Persiapan berupa Aturan Prosedur Konferensi dan rekomendasi terkait unsur-unsur di dalam *Arms Trade Treaty* atas Konferensi PBB tentang *Arms Trade Treaty* yang akan diadakan pada 2—27 Juli 2012.

Setelah Aturan Prosedural telah disepakati, diadakanlah Konferensi PBB tentang *Arms Trade Treaty* pertama pada 2—27 Juli 2012 dengan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/67/234 pada 24 Desember 2012 dengan perhitungan suara: 133 setuju, 17 abstain, dan 43 tidak memberikan suara; menunjukkan kekecewaan karena belum tercapainya kesepakatan dalam menguraikan instrumen yang mengikat secara hukum atas standar internasional bersama yang setinggi mungkin terhadap transfer senjata konvensional.

Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi PBB tentang *Arms Trade Treaty* kedua pada 18—28 Maret 2013 dalam menyelesaikan elaborasi *Arms Trade Treaty* sehingga dihasilkan teks final *Arms Trade Treaty* dengan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/67/234B pada 2 April 2013 dengan perhitungan suara: 154 setuju, 3 menolak, 23 abstain, dan 13 tidak memberikan

suara. *Arms Trade Treaty* dibuka untuk penandatanganan pada 3 Juni 2013 dengan 67 negara sebagai negara penandatangan, kemudian berlaku pada 24 Desember 2014 yang diikuti dengan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh 50 negara berdasarkan Pasal 22 poin 1 *Arms Trade Treaty*.⁵

Keterkaitan Kondisi Lingkungan Politik dan Keamanan dalam Perumusan Strategi Militer

Indikator arketipe pertahanan sebagai variabel sistemis yang memengaruhi perumusan strategi militer, mencakup postur keamanan dan prioritas pertahanan, mengindikasikan partisipasi dan tantangan negara-negara ASEAN di lingkungan keamanan dan pertahanan global.

PricewaterhouseCoopers

menunjukkan bagaimana kombinasi postur keamanan dan prioritas pertahanan, membentuk enam arketipe/model pertahanan baru yang membedakannya dari penulis-penulis lainnya atas model variabel sistemis. Terkait perumusan strategi militer, selain mengharuskan digunakannya variabel sistemis, kesesuaian dengan asumsi bahwa perilaku *balancing* suatu negara dipengaruhi oleh tingkatan ancaman. Seperti halnya tingkatan di dalam indikator pertahanan yang menunjukkan apakah suatu negara berfokus pada

⁵ *Arms Trade Treaty, Treaty Status: Adoption and Entry into Force*, diakses dari <https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883>, pada tanggal 2 Januari 2021.

ancaman teritorial atau ancaman global. Selain itu, model variabel sistemis ini memungkinkan negara-negara untuk menerapkan strategi militer yang lebih adaptif sebab postur keamanan tidak hanya superior, namun juga adaptif secara strategis terhadap perubahan lingkungan militer global sebagaimana prioritas pertahanan nasional.⁶ Dalam hal prioritas pertahanan, negara berkemungkinan menerapkan strategi militer yang adaptif terhadap skenario ancaman perang/konflik tertentu, seperti Thailand dengan skenario operasi militer terhadap ancaman di perbatasan utara (*land-based threats*), Malaysia dengan skenario operasi militer melalui keamanan maritim (*maritime security*) dan keamanan komunikasi jalur laur, dan Filipina dengan fokus skenario operasi militer kontrapemberontakan (*counterinsurgency*).⁷

Indikator budaya institusi militer sebagai variabel domestik yang memengaruhi perumusan strategi militer, mencakup doktrin militer dan hubungan sipil-militer. Indikator ini didasarkan pada sisi kultural di dalam studi keamanan internasional dalam mengungkap

pilihan strategis negara terhadap perang dan keamanan nasional. Oleh Alistair Finlan, sisi kultural di dalam institusi militer dapat berupa identitas dan kesadaran akan kekuatan konstruksi sosial, nilai dan norma, dan kaitan historis terhadap preferensi pendirian militer; sementara menurut Geoffrey Sloan, pengaruh kultural terhadap institusi militer mencakup doktrin militer, kekuatan tempur, dan pilihan strategi militer.⁸ Terhadap doktrin militer, strategi militer merupakan aplikasi dari doktrin militer melalui penempatan kekuatan militer terhadap ancaman tertentu. Ketiga sumber doktrin militer yang bersumber dari persepsi ancaman yang mencakup faktor keorganisasian, dan persepsi kesesuaian perilaku, memengaruhi negara-negara ASEAN dalam perumusan strategi militer, seperti doktrin militer Indonesia berupa Pertahanan dan Keamanan Semesta membentuk strategi militer pertahanan aktif dan doktrin militer Singapura berupa Pertahanan Total membentuk kombinasi strategi militer antara pertahanan aktif dan strategi militer lumba-lumba (*dolphin strategy*). Sementara hubungan-sipil militer, didasari oleh proposisi John Sislin bahwa rezim pemerintahan dengan dominasi militer cenderung menginginkan

⁶ Paul Davis, David Gompert, dan Richard Kugler, *Adaptiveness in National Defense: The Basis of a Framework*, (Cambridge: RAND Corporations, 1996), hal. 1—2.

⁷ Amitav Acharya, “The Association of Southeast Asian Nations: “Security Community” and “Defence Community”?” *Jurnal Pacific Affairs*, 64 (2), (Summer 1991), hal. 168—172.

⁸ Geoffrey Sloan, “Military Doctrine, Command Philosophy and the Generation of Fighting Power: Genesis and Theory,” *Jurnal International Affairs*, 88 (2), (Maret 2012), hal. 256—258.

transfer senjata lebih banyak daripada rezim pemerintahan yang didominasi oleh sipil⁹ sebab kepemilikan senjata sebagai simbol legitimasi kekuasaan dan prioritas elit militer dalam alokasi sumber daya, sehingga mendominasi pembuatan kebijakan pertahanan yang mengarah kepada peningkatan mekanisasi militer.¹⁰ Dalam konteks negara-negara ASEAN, hubungan sipil-militer yang cenderung profesional, negara akan mengembangkan strategi militer defensif, sementara ketika hubungan sipil-militer cenderung revolusioner negara akan mengembangkan strategi militer ofensif.

Indikator inovasi teknologi militer sebagai variabel domestik, mencakup impor senjata. Oleh Andi Widjajanto, indikator inovasi teknologi militer didasarkan pada internalisasi teknologi baru melalui perencanaan strategis ke dalam organisasi militer yang mengarah pada penemuan sistem persenjataan baru dan peningkatan kapabilitas militer untuk memangkan perang. Pemilihan cakupan di dalam indikator inovasi teknologi militer didasarkan oleh proposisi Pavel Yakovlev bahwa peningkatan dalam anggaran militer sejalan dengan

peningkatan impor senjata. Pavel beranggapan bahwa selain anggaran militer digunakan untuk mendanai alih teknologi senjata, anggaran militer juga digunakan untuk membiayai impor senjata yang mahal.¹¹ Kemudian proposisi Pavel ditegaskan kembali oleh temuan Simon Saldner bahwa negara dengan besaran perdagangan senjata yang lebih tinggi, terutama impor senjata, cenderung tidak bergabung ke dalam *Arms Trade Treaty*.¹² Berdasarkan proposisi tersebut, indikator inovasi teknologi militer melalui impor senjata memengaruhi perumusan strategi militer terutama perihal persepsi ancaman. Peningkatan impor senjata cenderung merepresentasikan strategi militer ofensif, seperti peningkatan impor senjata Myanmar pada domain darat terutama impor kendaraan tempur lapis baja, menunjukkan strategi militer Myanmar berbasis darat dalam melakukan kontrapemberontakan. Peningkatan impor senjata Singapura dalam pengadaan radar digunakan untuk memperkuat sistem avionik pada alutsista angkatan udara sebagai aplikasi strategi militer pertahanan aktif dan strategi militer lumba-lumba (*dolphin strategy*).

⁹ John Sislin, "Arms as Influence: The Determinants of Successful Influence," *Jurnal Conflict Resolution*, 38 (4), (Desember 1994), hal. 670—671.

¹⁰ Todd Sechser dan Elizabeth Saunders, "The Army You Have: The Determinants of Military Mechanization 1979—2001," *Jurnal International Studies Quarterly*, 54 (2), (Juni 2010), 488—489.

¹¹ Pavel Yakovlev, "Arms Trade, Military Spending, and Economic Growth," *Jurnal Defence and Peace Economic*, 18 (4), (Juni 2007), hal. 320—321.

¹² Simon Saldner, "*Determinants of Treaty Adoption: The Case of the Arms Trade Treaty*," (Leiden: Universitas Leiden, 2016), hal. 50—51.

Indikator kapabilitas tempur militer sebagai variabel domestik, mencakup alutsista pada domain angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, memengaruhi perumusan strategi militer negara-negara ASEAN. Oleh Andi Widjajanto, indikator kapabilitas tempur militer didasarkan pada proposisi Stephen Biddle menggunakan aplikasi gelar penindakan dan rasio kekuatan dalam menjelaskan keseimbangan *offense-defense*. Pemilihan cakupan di dalam indikator penggunaan kekuatan militer didasari bahwa negara dengan kapabilitas militer yang tinggi cenderung untuk tidak komit terhadap traktat kontrol senjata.¹³ Selain itu, beberapa negara dengan kekuatan militer kuat berkemungkinan memberikan perhatian besar pada kedaulatan nasional, membuat mereka menahan diri untuk tidak bergabung ke dalam traktat internasional. Dalam konteks negara dengan kekuatan militer lemah, Iida Keisuke beranggapan bahwa negara-negara berkekuatan militer lemah dapat bersatu untuk melawan negara dengan kekuatan militer yang kuat, dan hal tersebut dapat memengaruhi pilihan-pilihan komitmen traktat internasional.¹⁴

¹³ Agnes Brender, "Determinants of International Arms Control Ratification," *Jurnal Institute of Law and Economic Working Paper Series*, 17, (Oktober 2018), hal. 5—7.

¹⁴ Iida Keisuke, "Third World Solidarity: the Group of 77 in the UN General Assembly," *Jurnal International Organization*, 42 (2), (Spring 1988), hal. 379—381.

Terkait strategi militer, peningkatan kapabilitas tempur militer dapat menunjukkan penguatan terhadap strategi militer defensif dan ofensif. Peningkatan kapabilitas tempur militer dapat menunjukkan penggunaan strategi militer defensif untuk tujuan pertahanan seperti Singapura dengan kapabilitas tempur angkatan udara untuk tujuan pertahanan udara dalam mengembangkan strategi militer pertahanan aktif dan Indonesia dengan kapabilitas tempur angkatan darat terkuat dalam mengembangkan strategi militer pertahanan aktif. Sementara peningkatan kapabilitas tempur angkatan laut Filipina merupakan pengembangan terhadap strategi militer peperangan maritim.

Indikator tipe rezim pemerintahan sebagai variabel domestik, memengaruhi suatu negara dalam perumusan strategi militer. Pemilihan indikator tipe rezim pemerintahan didasari oleh proposisi Kurt Gaubatz bahwa negara dengan tipe pemerintahan demokrasi cenderung efektif dalam menentukan pilihan komitmen internasional,¹⁵ dengan keterlibatan di banyak badan di dalam proses pembuatan traktat internasional,¹⁶ namun tidak

¹⁵ Kurt Taylor Gaubatz, "Democratic States and Commitment in International Relations," *Jurnal International Organization*, 50 (1), (Winter 1996), hal. 122—123.

¹⁶ Tom Ginsburg, "Looking in Democracy: Constitutions, Commitment, and International Law," *Jurnal International*

membahayakan pilihan komitmen internasional ketika terjadi perubahan koalisi politik domestik.¹⁷ Di lain hal, negara dengan tipe rezim pemerintahan autokrasi, cenderung tidak mengikat diri di dalam proses pembuatan traktat internasional, dengan keterlibatan yang kecil, dan berpotensi membatalkan pilihan komitmen internasional ketika terjadi perubahan koalisi politik domestik. Negara yang cenderung demokratis seperti Indonesia dan Filipina, cenderung mengembangkan strategi militer defensif dengan ancaman terhadap kedaulatan dan teritorial negara, sementara Brunei Darussalam dan Vietnam cenderung mengembangkan strategi militer terhadap ancaman yang spesifik seperti penggunaan strategi militer perang asimetris dan strategi militer kontrapemberontakan.

Indikator ekonomi sebagai variabel domestik, berpengaruh terhadap proses perumusan strategi militer. Pemilihan cakupan dalam indikator ekonomi merupakan variabel kontrol standar dalam penelitian lintas nasional yang merepresentasikan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara secara umum.¹⁸ Pemilihan cakupan

indikator ekonomi, didukung oleh proposisi bahwa negara dengan PDB per kapita yang rendah, cenderung mengeluarkan biaya untuk kontrol ekspor senjata¹⁹ dan akan mengembangkan strategi militer yang cenderung defensif. Dengan kata lain, ketika suatu negara dengan tingkat PDB per kapita yang rendah, maka strategi militer defensif dibatasi oleh adanya kontrol ekspor senjata yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat mengimpor senjata dalam menghadapi ancaman eksistensial dan dengan demikian, strategi militer ofensif tidak dapat dikembangkan. Begitu juga ketika PDB per kapita tinggi, negara cenderung tidak akan mengeluarkan biaya untuk kontrol ekspor senjata dan dengan demikian, strategi militer ofensif dapat dikembangkan.

Law and Politics, 38 (4), (Juni 2006), hal. 750—752.

¹⁷ Brett Leeds, Michaela Mattes, dan Jeremy Vogel, "Interests, and the Reliability of International Commitments," *Jurnal American Journal of Political Science*, 53 (2), (April 2009), hal. 472—474.

¹⁸ Wade Cole, "Sovereignty Relinquished? Explaining Commitment to the International Human Rights Covenants

1966—1999," *Jurnal American Sociological Review*, 70 (3), (Juni 2005), hal. 479—481.

¹⁹ Richard Cupitt, Suzette Grillot, dan Yuzo Murayama, "The Determinants of Nonproliferation Export Controls: A Membership-Fee Explanation," *Jurnal The Nonproliferation Review*, 8 (2), (Summer 2001), hal. 75—77.

Preferensi Komitmen Negara-Negara ASEAN terhadap *Arms Trade Treaty*

Tabel 1. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	100.238 ^a	0.319	0.425

Tabel 2. Variables in the Equation

Step 1 ^a	Variables	B	S. E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)	95% C. I. for EXP (B)	
								Lower	Upper
	Arketipe Pertahanan	0.106	0.369	0.83	1	0.773	1.112	0.540	2.290
	Doktrin Militer	0.557	0.685	0.662	1	0.416	1.746	0.456	6.686
	Hubungan Sipil-Militer	-0.375	0.302	1.537	1	0.215	0.687	0.380	1.243
	Impor Senjata	0.709	0.699	1.029	1	0.310	2.033	0.516	8.007
	Kapabilitas Tempur Militer	-0.238	0.156	2.306	1	0.129	0.789	0.580	1.071
	Rezim Pemerintahan	0.291	0.080	13.267	1	0.000	1.338	1.144	1.566
	Ekonomi	1.176	0.717	2.688	1	0.101	3.242	0.795	13.228

- a. Variable(s) entered on step 1: Arketipe Pertahanan, Doktrin Militer, Hubungan Sipil-Militer, Impor Senjata, Kapabilitas Tempur Militer, Rezim Pemerintahan, Ekonomi.

Tabel pertama merupakan *Model Summary* yang mengindikasikan kemampuan model statistik dalam menjelaskan fenomena real, atau dengan kata lain mengindikasikan seberapa banyak variasi variabel dependen (pilihan komitmen) yang dapat dijelaskan oleh model statistik tersebut. *Cox & Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square* merupakan metode dalam mengalkulasikan variasi yang dapat dijelaskan (*explained variation*) guna mendapatkan nilai variasi/nilai R^2 semu (*pseudo R²*). Dalam hal ini, nilai R^2 semu melalui *Cox & Snell R*

Square sebesar 0.319 yang mengindikasikan bahwa model statistik tersebut mampu menjelaskan 31.9% pilihan komitmen negara-negara ASEAN terhadap *Arms Trade Treaty*. Sementara nilai R^2 semu melalui *Nagelkerke R Square* sebesar 0.425 yang mengindikasikan bahwa model statistik tersebut mampu menjelaskan 42.5% pilihan komitmen negara-negara ASEAN terhadap *Arms Trade Treaty*. Dengan demikian, nilai R^2 semu pada model statistik ini antara 31.9%—42.5% dengan kemampuan maksimal dalam menjelaskan pilihan komitmen

negara-negara ASEAN terhadap *Arms Trade Treaty* (variasi variabel dependen) sebesar 42.5%.

Tabel kedua merupakan *Variables in the Equation* yang memuat kontribusi masing-masing variabel independen dan signifikansi statistiknya terhadap model statistik. Tabel tersebut menunjukkan indikator tipe rezim pemerintahan sebagai satu-satunya indikator yang signifikan terhadap probabilitas negara-negara ASEAN untuk menandatangani teks *Arms Trade Treaty* dengan nilai signifikansi/nilai p (p value) sebesar 0.000. Indikator tipe rezim pemerintahan merupakan indikator yang signifikan secara statistik (*statistically significant*) sebab nilai p lebih kecil daripada nilai alfa (0.05). 0.000 sebagai nilai p dari indikator tipe rezim pemerintahan juga menunjukkan bahwa penggunaan indikator tersebut dalam model statistik serupa memiliki tingkat kesalahan tidak lebih dari 5%.

Interpretasi statistik juga dapat dilakukan dengan melihat besar pengaruh (*odds ratio*) masing-masing indikator terhadap variabel dependen melalui nilai Exp (B) sebagai berikut.

- a. Peningkatan level nilai arketipe pertahanan menyebabkan peningkatan kecenderungan sebesar 1.112 kali (*times*) bagi negara-negara ASEAN untuk

menandatangani teks *Arms Trade Treaty*.

- b. Negara ASEAN dengan doktrin militer yang bersumber dari persepsi kesesuaian perilaku memiliki kecenderungan sebesar 1.746 kali (*times*) untuk menandatangani teks *Arms Trade Treaty* daripada negara ASEAN dengan doktrin militer yang bersumber dari persepsi ancaman.
- c. Negara ASEAN dengan hubungan sipil-militer profesional memiliki kecenderungan sebesar 0.687 kali (*times*) untuk tidak menandatangani teks *Arms Trade Treaty* daripada negara ASEAN dengan hubungan sipil-militer revolusioner.
- d. Peningkatan nilai finansial impor senjata menyebabkan peningkatan kecenderungan sebesar 2.033 kali (*times*) bagi negara-negara ASEAN untuk menandatangani teks *Arms Trade Treaty*.
- e. Peningkatan nilai kapabilitas tempur militer menyebabkan penurunan kecenderungan sebesar 0.789 kali (*times*) bagi negara-negara ASEAN untuk menandatangani teks *Arms Trade Treaty*.
- f. Peningkatan nilai tipe rezim pemerintahan menyebabkan peningkatan kecenderungan sebesar 1.338 kali (*times*) bagi negara-negara ASEAN

untuk menandatangani teks *Arms Trade Treaty*.

- g. Peningkatan level nilai PDB per kapita (ekonomi) menyebabkan peningkatan kecenderungan sebesar 3.242 kali (*times*) bagi negara-negara ASEAN untuk menandatangani teks *Arms Trade Treaty*.

Kesimpulan

Indikator tipe rezim pemerintahan sebagai variabel domestik dan bagian dari kondisi lingkungan politik dan keamanan, merupakan satu-satunya indikator yang signifikan secara statistik (*statistically significant*) dalam model statistik regresi logistik, yang paling memengaruhi (probabilitas tertinggi) pilihan komitmen negara-negara ASEAN terhadap *Arms Trade Treaty*; mengindikasikan perbedaan pilihan komitmen negara-negara ASEAN terhadap *Arms Trade Treaty* ditentukan oleh perbedaan tipe rezim pemerintahan di mana semakin demokratis suatu negara maka semakin tinggi probabilitasnya untuk menandatangani teks *Arms Trade Treaty*.

Selain itu, Nilai R^2 semu sebesar 42.5%, terhadap negara penandatangan teks *Arms Trade Treaty*, model statistik regresi logistik dengan tepat memprediksi komitmen Filipina, Malaysia, dan Singapura ke dalam kelompok 1 (penandatangan); sementara terhadap negara dengan tingkat komitmen pada proses negosiasi,

model statistik regresi logistik dengan tepat memprediksi komitmen Laos dan Vietnam ke dalam kelompok 0 (proses negosiasi). Hal ini mengindikasikan bahwa nilai di dalam ketujuh indikator dalam kondisi lingkungan politik dan keamanan secara simultan menghasilkan probabilitas yang memungkinkan negara tersebut untuk sepenuhnya dikelompokkan ke dalam kelompok 0 atau kelompok 1.

Dalam kaitannya dengan neorealisme terutama realisme defensif, temuan penelitian menunjukkan bagaimana asumsi realisme defensif bekerja melalui penggunaan variabel sistemis dan variabel domestik dalam pilihan komitmen negara-negara ASEAN terhadap *Arms Trade Treaty* dengan variabel domestik berupa indikator tipe rezim pemerintahan yang signifikan secara statistik dan bahwa di dalam sistem internasional yang anarki di mana negara-negara berkemungkinan bekerja sama satu sama lain dalam kerangka kerja sama yang terbatas dan didasarkan pada ancaman bersama, maka negara-negara ASEAN telah menunjukkan kerja sama (komitmen internasional) yang terbatas pada proses negosiasi dan penandatangan teks *Arms Trade Treaty* melalui perumusan strategi militer yang menunjukkan seberapa besar persepsi ancaman terhadap absen atau tidaknya regulasi transfer senjata konvensional.

Daftar Pustaka

Buku

Lake, David dan Powell, Robert (eds.). 1999. *Strategic Choice and International Relations*. New Jersey: Princeton University Press

Jurnal dan Laporan Penelitian

Acharya, Amitav. 1991. "The Association of Southeast Asian Nations: "Security Community" and "Defence Community"? *Jurnal Pacific Affairs*, Summer 1991, vol. 64 (2), hal. 168—172.

Brender, Agnes. 2018. "Determinants of International Arms Control Ratification," *Jurnal Institute of Law and Economic Working Paper Series*, Oktober 2018, vol. 17, hal. 5—7.

Cole, Wade. 2005. "Sovereignty Relinquished? Explaining Commitment to the International Human Rights Covenants 1966—1999," *Jurnal American Sociological Review*, Juni 2005, vol. 70 (3), hal. 479—481.

Cupitt, Richard, Grillot, Suzette, dan Murayama, Yuzo. 2001. "The Determinants of Nonproliferation Export Controls: A Membership-Fee Explanation," *Jurnal the Nonproliferation Review*, Summer 2001, vol. 8 (2), hal. 75—77.

Davis, Paul, Gompert, David, dan Kugler, Richard. 1996. *Adaptiveness in National Defense: The Basis of a*

Framework. Cambridge: RAND Corporations.

Gaubatz, Kurt Taylor. 1996. "Democratic States and International Commitments." *Jurnal International Organisation*, Winter 1996, vol. 50 (1), hal. 10—123.

Ginsburg, Tom. 2006. "Looking in Democracy: Constitutions, Commitment, and International Law," *Jurnal International Law and Politics*, Juni 2006, vol. 38 (4), hal. 750—752

Keisuke, Iida. 1988. "Third World Solidarity: The Group of 77 in the UN General Assembly," *Jurnal International Organization*, Spring 1988, vol. 42 (2), hal. 379—381.

Leeds, Brett, Mattes, Michaela, dan Vogel, Jeremy. 2009. "Interests, and the Reliability of International Commitments," *Jurnal American Journal of Political Science*, April 2009, vol. 53 (2), hal. 472—474.

Lupu, Yonatan. 2013. "The Informative Power of Treaty Commitment: Using the Spatial Model to Address Selection Effects." *Jurnal American Journal of Political Science*, Oktober 2013, vol. 57 (4), hal. 912—913.

Saldner, Simon. 2016. "Determinants of Treaty Adoption: The Case of the Arms Trade Treaty." Leiden: Universitas Leiden.

Sechser, Todd, dan Saunders, Elizabeth. 2010. "The Army

- You Have: The Determinants of Military Mechanization 1979—2001,” *Jurnal International Studies Quarterly*, Juni 2010, vol. 54 (2), hal. 488—489.
- Sislin, John. 1994. “Arms as Influence: The Determinants of Successful Influence,” *Jurnal Conflict Resolution*, Desember 1994, vol. 38 (4), hal. 670—671.
- Sloan, Geoffrey. 2012. “Military Doctrine, Command Philosophy and the Generation of Fighting Power: Genesis and Theory,” *Jurnal International Affairs*, Maret 2012, vol. 88 (2), hal. 256—258.
- Yakovlev, Pavel. 2007. “Arms Trade, Military Spending, and Economic Growth,” *Jurnal Defence and Peace Economic*, Juni 2007, vol. 18 (4), hal. 320—321.
- Situs Web**
- Arms Trade Treaty. *Treaty Status: Adoption and Entry into Force*. <https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883>. (22/12/2019)